

PB 12 - 08/2025



INISIASI “KAMPUNG KREATIF” BERMODAL TENAGA KERJA PRODUKTIF

MASNI

Kepala Subbagian Program Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Kabupaten Luwu

Pendahuluan

Secara Makro, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 mengalami peningkatan mencapai 4,14% (BPS, 2025) dari tahun sebelumnya 3,70% (BPS, 2024). Pengangguran yang meningkat ini disumbang dari angkatan kerja yang juga meningkat. Namun demikian, tingkat pengangguran tersebut tersebar di 22 Kecamatan secara tidak merata. Pada wilayah yang memiliki usaha industri besar (seperti perusahaan tambang dan pengolahan), tenaga kerja lokalnya memiliki kesempatan dan peluang untuk dapat bekerja di sektor formal. Sebaliknya, di wilayah yang tidak memiliki usaha besar, akan sulit mendapatkan akses untuk bekerja di sektor formal tersebut.

Sebagian besar wilayah daerah/ kabupaten adalah area pedesaan dengan tingkat pengangguran yang sedikit lebih rendah dibanding dengan area perkotaan. Namun kondisi ini tidak memberikan jaminan bahwa kesejahteraan warga desa lebih baik dari di perkotaan. Beberapa desa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem membuktikan bahwa perekonomian di desa tidak berkembang atau produktivitasnya rendah padahal potensi sumber daya alamnya melimpah. Pada 2 tahun terakhir Kabupaten Luwu termasuk 3 besar daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi yakni 11,70% (BPS, 2025).

Policy Brief Series

Agustus 2025



Ditujukan Kepada

- Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu

Ringkasan Eksekutif

Tenaga kerja produktif adalah salah satu kunci utama dalam mendorong kemajuan dan kemandirian ekonomi, bukan hanya di perkotaan termasuk pula di wilayah pedesaan. Selama ini tenaga kerja pedesaan identik dengan produktivitas yang rendah dan termasuk dalam kategori pengangguran ataupun setengah pengangguran. Padahal potensi lokal desa kaya dengan sumber daya pertanian dan perkebunan yang subur dan terbentang luas serta komoditas perikanan yang melimpah. Potensi ini sebenarnya dapat melahirkan ide-ide kreatif yang dapat mengubah perekonomian di desa menjadi lebih berkembang. Dengan kekuatan modal sosial, tenaga kerja ini dapat menciptakan desa yang berkembang dalam segala dimensinya menjadi kampung kreatif yang menjanjikan. Dalam hal ini diperlukan peran pemerintah untuk secara bersama mendukung upaya mengatasi pengangguran dengan mengoptimalkan pemberdayaan bagi masyarakat di desa dengan instrumen kebijakan dan penataan kelembagaan sosial

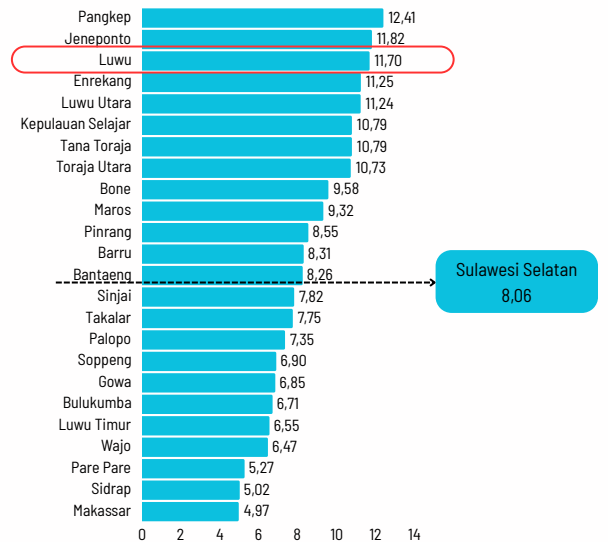


Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber : BPS, 2024

Angka Kemiskinan Sulawesi Selatan



Sumber : BPS, 2024

Deskripsi Masalah

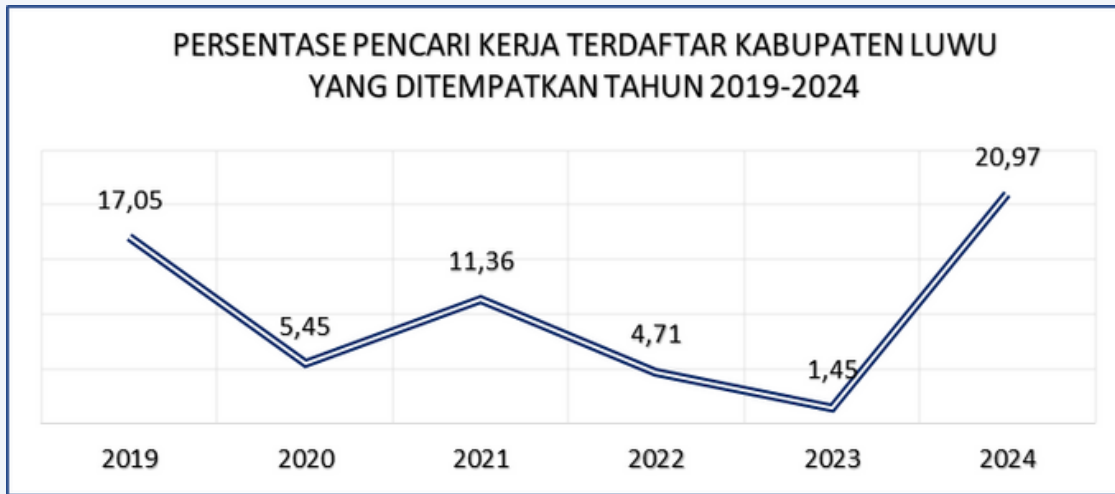
Mencermati tingkat pengangguran yang meningkat tersebut, ditemukan tiga masalah pokok yang terjadi ; **Pertama**, pencari kerja hanya terserap tidak lebih dari 21% di pasar kerja (Data Disnakertrans Luwu, 2024). Para penganggur yang mencari kerja sebagian besar tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga tidak dapat menduduki posisi jabatan yang dilamar meskipun permintaan cukup tinggi. Umumnya pencari kerja didominasi lulusan SLTA dan S1 (Sarjana) namun dengan kompetensi yang bukan merupakan kebutuhan penyedia kerja.

Kedua, Informasi pasar kerja yang terbatas menyebabkan pencari kerja tidak memiliki kesempatan untuk melamar pekerjaan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi geografis daerah yang sebagian besar adalah area pedesaan menjadi penyebab rendahnya akses informasi lowongan kerja. Sebagian wilayah daerah belum memiliki akses internet yang baik sehingga lambat memperoleh info lowongan kerja.

Ketiga, Adanya kecenderungan minat tenaga kerja yang rendah untuk berwirausaha. Kurangnya minat berwirausaha salah satunya disebabkan wirausaha membutuhkan modal yang cukup besar sementara tidak ada jaminan terhadap resiko/ kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Di sisi lain, pedesaan memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan oleh tenaga kerja yang ada di wilayahnya. Dengan modal sosial dan budaya yang ada di desa dapat terbentuk komunitas ekonomi yang kreatif berbasis kearifan lokal. Akan tetapi hal tersebut tidak terwujud disebabkan masalah yang beragam, diantaranya, adalah ;

Pertama, keterampilan masyarakat desa untuk meningkatkan nilai jual produk lokal masih sangat kurang. Sebagaimana diketahui, wilayah kabupaten Luwu kaya dengan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, akan tetapi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan hanya sebagian kecil saja yang dapat ditingkatkan nilai jualnya dengan menjadikannya produk olahan (salah satunya seperti kopi).



Sumber : BPS, 2024

Selain membutuhkan modal yang tidak sedikit, dari aspek pemasarannya pun menjadi kendala. Akibatnya, usaha mikro cenderung banyak yang tidak berkembang atau hanya bertahan beberapa tahun saja (Ilmi, 2021 :105). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan industri Kecil di Kabupaten Luwu yang hanya meningkat 5,02%. (Data LKJIP Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu, 2024).

Persoalan **kedua**, dalam usaha mandiri masyarakat pedesaan yakni tidak ada sosok penggerak yang dapat memberikan penguatan bagi keberlangsungan usaha. Umumnya usaha kecil terbentuk tanpa manajemen yang terstruktur dan terencana. Proses produksi dilakukan hanya sesuai permintaan dengan tidak adanya target penjualan. Umumnya di pedesaan, usaha kecil ini berlangsung secara tradisional dan hanya menghimpun 3 atau 4 orang tenaga kerja dengan jam kerja yang fleksibel dan upah yang kecil. Kondisi ini tentu saja tidak dapat menopang ekonomi keluarga dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan.

Alternatif Kebijakan

Terdapat beberapa alternatif solusi sebagai tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi persoalan pengangguran yang kompleks di daerah pedesaan tersebut, yaitu :

Kolaborasi stakeholder dalam melaksanakan pembinaan usaha mikro dengan pendekatan modal sosial dan pendampingan berkala.

Usaha mikro yang terbentuk dari nilai-nilai sosial budaya lokal seperti kebersamaan, kepercayaan, norma susila, keeratan, kekerabatan dan lainnya yang dikolaborasikan dengan stakeholder terkait, pemerintah, swasta dan masyarakat akan memiliki kekuatan untuk dibangun dan dikembangkan secara terarah dan berkelanjutan. Kekuatan itu bersumber dari tindakan kolektif yang didasari oleh rasa saling percaya yang tinggi yang akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai macam bentuk kegiatan khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.

Inisiasi 'Kampung Kreatif' untuk menumbuhkan motivasi dan partisipasi warga desa.

Inisiasi kampung kreatif dapat menjadi strategi yang mengawali terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini disebabkan masyarakat secara menyeluruh akan fokus pada pengembangan ekonomi yang menjadi komoditi unggulan wilayahnya. Desa yang mampu berkembang dengan keunggulan wilayahnya akan menjadi objek wisata yang menarik untuk dikunjungi sehingga menggerakkan tenaga kerja

Peningkatan akses informasi dengan pengembangan jaringan komunikasi dan infrastruktur yang diperlukan secara bertahap, khususnya tenaga kerja untuk mencari peluang kerja.



Rekomendasi

Berdasarkan analisis permasalahan dan alternatif solusi maka pilihan rekomendasi yang ditawarkan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu bersama dengan perangkat daerah terkait harus merumuskan program kolaboratif yang menginisiasi lahirnya “Kampung Kreatif” sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat, khususnya tenaga kerja di wilayah pedesaan dalam rangka mengembangkan ekonomi lokal.

Agenda program tersebut harus berkesinambungan dan dievaluasi setiap tahap pelaksanaannya secara berkala. Pemerintah daerah harus melibatkan berbagai pihak (tokoh masyarakat, Lembaga adat, korporasi/ instansi swasta, dan komunitas lainnya) untuk mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat dan mempercepat penanganan pengangguran dan kemiskinan, serta proaktif melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pemantauan agar program yang dijalankan terlaksana optimal, efektif, efisien dan tepat sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Franita, R., Fuady, A. (2019) Analisa pengangguran di Indonesia. Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial), 2 Desember pp. 88–96.
- Subarsono, A.G. (2010) Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Penata Aksara.
- Suparman, (2022) Pembangunan Ketenagakerjaan : Teori, Konsep, Model dan Studi Empiris. Jakarta : IKAPI.